

DAMPAK PENJAJAHAN BELANDA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA

Novia Tutasqiyah¹, Alfina Filanda Rohmadi², Natalia Na³,
Asha Leona Amanta⁴, Suanto⁵

^{1,2,3}Universitas Pamulang

*¹noviatutasqiyah20@gmail.com, *²filandaalfina@gmail.com, *³ natalianaenalo99@gmail.com,
*⁴ashaleona3@gmail.com, *⁵dosen02190@unpam.id

Naskah diterima: 15-12-2023, direvisi: 17-12-2023, disetujui: 30-12-2023

ABSTRAK

Dampak yang sangat krusial dialami oleh rakyat hindia belanda pada masa pemerintahan belanda. Adanya stratifikasi sosial yang dialami rakyat pribumi menyebabkan adanya klasifikasi rakyat berdasarkan harta dan tahta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak penjajahan belanda terhadap struktur sosial di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu kajian literatur dengan mencari jurnal yang terkait dengan materi. Penulisan ini membahas lebih jauh mengenai dampak yang dialami rakyat pribumi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Kata kunci : Dampak Penjajahan, Penjajahan Belanda, Stuktur Sosial

PENDAHULUAN

Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama lebih dari tiga abad dan membawa dampak mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Sebelum penjajahan, struktur sosial masyarakat Indonesia umumnya bersifat tradisional dan berbasis pada sistem kekerabatan serta adat istiadat lokal. Namun, kedatangan Belanda memperkenalkan hierarki sosial baru yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik kolonial.

Sistem stratifikasi sosial pada masa penjajahan Belanda secara eksplisit menciptakan perbedaan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat. Bangsa Eropa, khususnya Belanda, ditempatkan di lapisan teratas struktur sosial, sementara masyarakat pribumi, khususnya petani dan buruh, berada di lapisan terbawah. Kondisi ini diperparah dengan adanya diskriminasi rasial yang dilembagakan dalam kebijakan pemerintah kolonial, seperti pengelompokan berdasarkan ras (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing kelompok.

Selain itu, kebijakan ekonomi kolonial seperti sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Masyarakat pribumi banyak yang kehilangan tanah dan mata pencaharian, sementara kekayaan yang dihasilkan dari tanah air mereka dinikmati oleh pihak kolonial dan segelintir elite lokal yang bekerja sama dengan penjajah (An-Nur.ac.id, 2020).

Penjajahan juga memengaruhi pola pikir masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda lebih banyak ditujukan kepada kelompok elite pribumi, menciptakan jurang pendidikan antara golongan elite dan rakyat biasa. Hal ini menambah kompleksitas masalah sosial, karena hanya segelintir orang yang memiliki akses ke pendidikan tinggi dan peluang ekonomi yang lebih baik (Siahaan, 2020).

Dalam kajian sejarah dan sosiologi, dampak penjajahan Belanda terhadap struktur sosial di Indonesia menjadi fokus penting untuk memahami bagaimana warisan kolonial masih memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia hingga saat ini. Dengan memahami dampak-dampak tersebut, kita diharapkan dapat belajar dari sejarah untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Metode penelitian ini yaitu kajian pustaka. Metode penelitian ini memuat ulasan dan analisis terhadap berbagai literatur terkait sebelumnya. Penyusunan kajian pustaka meliputi enam tahapan; dimulai dari menentukan topik, mencari literatur terkait, mengembangkan argument, melakukan survey terhadap literatur terkait, mengkritisi literatur, dan menulis tinjauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjajahan Belanda di Hindia Belanda selama kurang lebih 350 Tahun membawa dampak besar yang luar biasa terhadap Struktur Sosial di Indonesia. Pasalnya Belanda ini membagi masyarakat Hindia Belanda pada itu kedalam beberapa kelas sosial, yaitu *“Masyarakat dibagi dalam tiga golongan besar: golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi, yang membawa diskriminasi sosial secara formal”* (Sulistiyowati, 2020, dalam Tirto.id)

Pendidikan menjadi dampak struktur sosial dalam penjajahan Belanda yang Terbatas untuk Pribumi Pendidikan modern yang diperkenalkan Belanda, terutama melalui kebijakan Politik Etis, pada dasarnya tidak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Pendidikan hanya diberikan kepada sebagian kecil golongan pribumi untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial. Sistem ini melanggengkan kesenjangan sosial dan menghambat mobilitas sosial masyarakat pribumi. Dampak dari adanya kebijakan politik etis yang konon katanya merupakan politik balas budi pemerintah Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda menimbulkan adanya kalangan kelas atas dan kelas bawah. Kebijakan ini, utamanya kebijakan pendidikan (edukasi) hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Pendidikan yang dibatasi bagi golongan tertentu menciptakan kaum elit terdidik pribumi. *“Kaum elit terdidik muncul sebagai hasil dari akses pendidikan terbatas yang diberikan Belanda, dan mereka memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional”* (Sulistiyowati, 2020). Mereka awalnya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial, tetapi akhirnya menjadi motor pergerakan nasional. Kalangan Bumi Putera yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu baik di Indonesia maupun di Belanda turut andil dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan organisasi pergerakan dan organisasi kepemudaan. Hal ini sesuai dengan pandangan Sulistiyowati (2020) bahwa *“Kaum elit terdidik muncul sebagai hasil dari akses pendidikan terbatas yang diberikan Belanda, dan mereka memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional”*

Penjajahan Belanda memperkenalkan sistem kasta yang membedakan secara tajam antara golongan Eropa, golongan timur asing (terutama Cina), dan pribumi. Sistem ini menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan ras, yang memperburuk ketimpangan sosial. Golongan Eropa mendominasi posisi pemerintahan dan ekonomi, sementara pribumi sering kali hanya mendapatkan peran sebagai tenaga kerja rendahan.

Dalam konteks budaya, gaya hidup dan nilai-nilai Barat mulai masuk ke lapisan atas masyarakat pribumi, terutama di kalangan priyayi. Hal ini menciptakan ketimpangan budaya antara masyarakat yang mengikuti tradisi lokal dan mereka yang mengadopsi budaya Barat

Penjajahan Belanda yang berlangsung lebih dari tiga abad membawa perubahan besar pada struktur sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang signifikan:

1. Pembentukan Sistem Kasta

Belanda memperkenalkan sistem sosial yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan utama: golongan Eropa, golongan Timur Asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan golongan pribumi. Sistem ini memperkuat diskriminasi rasial dan stratifikasi sosial di masyarakat. Penjajahan Belanda selama lebih dari tiga abad membawa perubahan signifikan pada struktur sosial di Indonesia, salah satunya melalui penerapan sistem kasta kolonial. Belanda membagi masyarakat menjadi tiga golongan: golongan Eropa dengan hak istimewa, golongan Timur Asing sebagai kelas menengah, dan golongan pribumi sebagai kelas terendah yang sangat terpinggirkan. Sistem ini memperkuat diskriminasi rasial, yang terlihat dalam akses pendidikan, hukum, dan pekerjaan. Golongan pribumi kerap menjadi korban eksploitasi, sementara golongan Timur Asing dimanfaatkan sebagai pedagang perantara.

Stratifikasi sosial yang diciptakan ini berdampak panjang, termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi, sentimen etnis, serta warisan diskriminasi yang terus memengaruhi masyarakat Indonesia bahkan setelah kemerdekaan. Sistem kasta yang diperkenalkan Belanda tidak hanya memperkuat diskriminasi sosial selama masa kolonial tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang yang memengaruhi struktur sosial dan hubungan antaretnis di Indonesia. Upaya untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi ini menjadi tantangan penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara di masa pasca-kolonial.

2. Kemunculan Elit Terpelajar

Pada masa kolonial, pendidikan modern awalnya diperuntukkan bagi golongan elit, tetapi kemudian melahirkan kelompok kecil elit terpelajar pribumi. Kelompok ini berperan penting dalam mencetuskan ide nasionalisme, memimpin organisasi pergerakan, menyebarkan gagasan melalui media, meningkatkan kesadaran sosial-politik, dan bahkan berperan dalam diplomasi internasional. Mereka menjadi katalisator yang memperjuangkan keadilan dan melawan dominasi kolonial, sehingga membangun kesadaran nasional yang akhirnya memicu pergerakan menuju kemerdekaan.

Kemunculan elit terpelajar pribumi, yang awalnya merupakan produk kebijakan kolonial, justru menjadi kekuatan utama dalam membangun kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan pendidikan modern, mereka menjembatani rakyat dan ide-ide modern tentang kebebasan, yang menjadi fondasi utama lahirnya Indonesia merdeka.

3. Munculnya Kelas Buruh dan Sistem Feodal Baru

Kebijakan ekonomi kolonial, seperti tanam paksa dan pengembangan perkebunan besar, menciptakan kelas buruh baru yang terpaksa bekerja di sektor pertanian dan pabrik dengan kondisi yang sangat sulit. Kelas buruh ini hidup dalam ketergantungan pada sistem kolonial, mengalami eksploitasi, dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, penguasa lokal (priyayi) yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial memperkuat sistem feodal yang sudah ada, mengawasi dan mengendalikan rakyat. Sistem feodal ini memperpanjang ketidakadilan sosial, memperburuk ketimpangan antara kelas penguasa dan rakyat biasa. Kebijakan kolonial menghasilkan pembentukan kelas buruh baru yang tertekan dan terkendali, sementara penguasa lokal memperkuat sistem feodal yang memelihara ketimpangan sosial. Sistem ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, dengan rakyat biasa berada dalam posisi yang terpinggirkan, sementara penguasa lokal dan kolonial mempertahankan kontrol mereka atas masyarakat.

4. Disintegrasi Nilai Tradisional

Kebijakan kolonial yang eksploitatif menyebabkan terganggunya tatanan adat dan struktur sosial tradisional masyarakat Indonesia. Peran pemimpin adat yang sebelumnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat semakin tereduksi, karena penguasa lokal yang lebih loyal kepada kolonial menggantikannya. Solidaritas komunitas yang semula kuat juga mulai melemah, akibat kebijakan seperti tanam paksa dan pajak yang membebani rakyat, mengurangi interaksi sosial antar anggota

komunitas. Selain itu, kebijakan kolonial memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan kelas sosial yang terpisah, sementara sistem pendidikan Barat mengikis nilai-nilai budaya tradisional. Kebijakan kolonial mengakibatkan disintegrasi nilai tradisional, mengubah struktur sosial, dan merusak solidaritas dalam komunitas. Pengurangan peran pemimpin adat dan perpecahan dalam kelas sosial menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam, sementara pendidikan kolonial memperkenalkan nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya lokal. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan ikatan sosial dan identitas tradisional mereka, yang berdampak besar pada keharmonisan sosial.

5. Mobilitas Sosial Terbatas

Pada masa kolonial, mobilitas sosial bagi pribumi sangat terbatas karena kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pendidikan yang terbatas untuk pribumi menghalangi mereka untuk memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan atau sektor ekonomi. Selain itu, posisi-posisi penting dipegang oleh golongan Eropa dan Timur Asing, sementara pribumi hanya memiliki akses terbatas pada pekerjaan rendah, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Struktur sosial yang hierarkis dan kontrol politik yang eksklusif semakin memperkecil peluang bagi pribumi untuk naik kelas sosial, menciptakan kesenjangan sosial yang besar. Mobilitas sosial yang terbatas bagi pribumi pada masa kolonial disebabkan oleh sistem pendidikan yang eksklusif, pembatasan akses pekerjaan strategis, dan kontrol politik yang ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial yang besar antara pribumi dan golongan kolonial, di mana pribumi terhalang untuk memperbaiki posisi sosial dan ekonomi mereka. Ketimpangan ini meninggalkan dampak yang signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan.

6. Peningkatan Urbanisasi dan Transmigrasi

Pada masa kolonial Belanda, urbanisasi dan transmigrasi merupakan dua kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan pola pemukiman masyarakat Indonesia. Urbanisasi terjadi seiring berkembangnya kota-kota besar yang menjadi pusat administrasi dan industri kolonial. Banyak pribumi yang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor perdagangan, pelabuhan, atau industri, meskipun sebagian besar hanya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh dengan kondisi hidup yang sangat buruk di kawasan kumuh.

Selain urbanisasi, transmigrasi juga menjadi kebijakan penting di mana penduduk dari Jawa yang padat penduduk dipindahkan ke wilayah-wilayah yang kurang berkembang seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Tujuan utama transmigrasi adalah untuk menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan kolonial yang dikelola oleh Belanda. Namun, banyak transmigran yang menghadapi kondisi hidup yang sulit, bekerja dengan upah rendah, dan terisolasi secara sosial dan budaya.

Dampak sosial dan ekonomi dari kedua fenomena ini sangat signifikan, mengubah struktur sosial masyarakat dengan menciptakan perbedaan besar antara golongan yang terlibat dalam sektor perkebunan dan industri dengan mereka yang tetap tinggal di pedesaan. Selain itu, kebijakan ini juga mempermudah pengendalian sosial oleh pemerintah kolonial, karena penduduk yang terdistribusi di daerah-daerah terpencil lebih mudah dikendalikan. Peningkatan urbanisasi dan transmigrasi pada masa kolonial memiliki dampak jangka panjang terhadap pola pemukiman dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial dengan menyediakan tenaga kerja murah untuk sektor perkebunan dan industri, namun pada saat yang sama juga menyebabkan ketimpangan sosial yang besar, kemiskinan, dan eksploitasi terhadap penduduk pribumi. Selain itu, kebijakan ini juga memfasilitasi kontrol sosial oleh pemerintah kolonial dengan memindahkan penduduk ke wilayah terpencil yang sulit untuk diakses dan dikelola oleh kelompok pribumi. Akibatnya, meskipun tujuan awal dari urbanisasi dan transmigrasi adalah untuk mendukung

ekonomi kolonial, dampaknya terhadap masyarakat Indonesia menciptakan ketidaksetaraan sosial yang mendalam dan kesulitan hidup yang signifikan bagi banyak pribumi.

KESIMPULAN

Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun membawa dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Masyarakat dibagi dalam sistem kasta yang menciptakan diskriminasi rasial, sementara akses pendidikan terbatas melahirkan elit terpelajar yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Kebijakan ekonomi kolonial seperti tanam paksa menciptakan kelas buruh yang dieksploitasi dan memperburuk ketidakadilan sosial. Selain itu, nilai-nilai tradisional tergeser oleh budaya Barat, solidaritas komunitas melemah, dan mobilitas sosial pribumi sangat terbatas. Meskipun penuh ketimpangan, kemunculan elit terpelajar menjadi pemicu kesadaran nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nur.ac.id. (2020). *Dampak Kolonialisme di Indonesia: Perubahan Sosial dan Politik*. Diakses dari <https://an-nur.ac.id/esy/dampak-kolonialisme-di-indonesia-perubahan-sosial-politik-dan-ekonomi-pada-masyarakat-pribumi.html>.
- Siahaan, S. (2020). *Pendidikan pada Masa Kolonial: Politik Etis dan Pendidikan Terbatas untuk Pribumi*. Jurnal Pendidikan Sejarah.
- Sulistiyowati, A. (2020). *Sejarah Indonesia: Dampak Penjajahan terhadap Struktur Sosial*. Modul Pembelajaran SMA.
- Tirto.id. (2020). "Dampak Kolonialisme di Indonesia: Pembagian Kelas Sosial". Diakses dari <https://tirto.id>.